



HASIL PENELUSURAN TIM PENCARI FAKTA KKJ

Wartawan Karo Dibakar Usai Beritakan Perjudian

Kuat Dugaan Libatkan Oknum Aparat

Medan, MIMBAR - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara yang terdiri dari lembaga profesi jurnalis AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan dan FJPI telah melakukan verifikasi dan pendalaman terkait kasus kebakaran rumah yang menewaskan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Bersambung ke Hal 11



Ketua Harian Kompolnas memberikan keterangan kepada wartawan saat mengunjungi Mapolres Tanah Karo. (Foto Mimbar/Jusranta Surbakti)

Kompolnas RI Kunjungi Polres Tanah Karo dan TKP Kejadian

KOMISI Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) menyambangi Polres Tanah Karo, Selasa (2/7) sekira pukul 17.00 WIB. Kehadiran mereka untuk mendengar

Bersambung ke Hal 11

TNI: Silahkan Laporkan ke PM

Medan, MIMBAR – TNI Angkatan Darat (TNI AD) buka suara soal dugaan keterlibatan anggota dalam kebakaran rumah milik Sempurna Pasaribu, wartawan media tribrata tv di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dalam insiden itu, empat orang tewas terbakar yakni Sempurna Pasaribu (40), istrinya Eprida Br Ginting (48), anaknya Sudiinveseti Pasaribu (12) dan cucunya bernama Lowi Situngkir (3). Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan, jika memang ada bukti keterlibatan anggota,

Bersambung ke Hal 11



DUGAAN KORUPSI DI PADANG LAWAS UTARA MENCUAT

Poldasu dan Kejatisu Didesak Segera Bertindak

Medan, MIMBAR - Puluhan masa yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Demokrasi empat belas (PD-14) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) menggelar unjuk rasa di Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan, Selasa (2/7). Mereka mendesak agar kasus dugaan korupsi berjamaah oleh pejabat pemerintahan Padang Lawas Utara segera diusut tuntas.

Aksi unjuk rasa digelar di depan Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Aksi berjalan tertib dan aman serta mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat.

Koordinator aksi Afrizal Harahap, dalam orasinya meminta agar aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) segera melakukan penyelidikan terkait

dugaan korupsi mengakibatkan kerugian negara secara berjamaah, sistemik dan masif di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Massa menilai, dugaan korupsi terjadi pada pembangunan infrastruktur dan sejumlah kegiatan lain diduga fiktif melibatkan kepala dinas dan kepala desa di Paluta.

Bersambung ke Hal 11

Tiga Eks Pejabat RSUP Adam Malik Didakwa Korupsi Rp8 M



Medan, MIMBAR - Tiga mantan pejabat RSUP Adam Malik Medan didakwa melakukan tindak pidana korupsi Rp8 miliar dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Ketiga terdakwa adalah mantan Direktur Utama RSUP Adam Malik Bambang Prabowo (63), mantan Direktur Keuangan RSUP Adam Malik Mangapul Bakara (65), dan mantan Bendahara Pengeluaran BLU RSUP Adam Malik Ardriyansyah Daulay (37).

Dakwa itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum Kejari Medan Suryanta Desy Christiani dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (1/7/2024).

Bersambung ke Hal 11

Kasus Gratifikasi Eks Bupati Langkat

KPK Sita Uang Rp22 Miliar

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sejumlah Rp22 miliar terkait dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ikut serta dalam kegiatan proyek dengan tersangka mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dan Iskandar Perangin Angin (kakak kandung Terbit).



"Bahwa uang yang disita jumlahnya sebesar Rp22 miliar dan tersimpan pada rekening atas nama tersangka di sebuah bank umum daerah yang telah diblokir sebelumnya oleh KPK

sejak 2022," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (2/7), seraya menyatakan, penyitaan dilakukan sepekan sebelumnya, Selasa (25/6). Dalam proses penyidikan

berjalan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Dua di antaranya ialah Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa Lina dan Staf Bank Sumatera Utara Laila Subank pada Kamis, 19 Januari 2023 lalu.

Terbit dan Iskandar disangkakan melanggar Pasal 12 B dan Pasal 12 i Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Ini merupakan kasus kedua Terbit dan Iskandar yang diproses oleh KPK. Sebelumnya, Terbit divonis dengan pidana sembilan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi lima bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Bersambung ke Hal 11

Utang Negara Tembus Rp8.353 T

Jakarta, MIMBAR - Utang pemerintah menyentuh Rp8.353,02 triliun per Mei 2024. Angka ini naik sebesar Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.338,43 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah tersebut mayoritas dalam bentuk surat berharga negara (SBN).

"Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 87,96 persen," bunyi laporan Kemenkeu dalam Buku APBN Kita.

Bersambung ke Hal 11



Jangan sampe lolos... Hehehe...

Jadwal Salat

26 ZULHIJAH 1445 H

Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:42 WIB
Zuhur : 12:33 WIB	Isya : 19:57 WIB
Ashar : 15:58 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah

Budaya Mundur

Oleh Dr A Rasyid, MA



CUKUP sering kita dengar rakyat minta mundur pejabat yang lagi memimpin, bukan saja pejabat Kepala Daerah, tetapi juga Kepala Negara. Namun faktanya hingga hari ini tidak ada yang mundur karena tuntutan rakyat. Kecuali Presiden Soeharto.

Memang negeri kita berbeda dengan negara Taiwan atau negara Eropah, mereka di sana cepat merasa bersalah, dan cepat sadar untuk mundur dari jabatan. Sependungnya mundur dari jabatan itu sudah membudaya.

Bersambung ke Hal 11

PKPU Pilkada Resmi Diteken

CAGUB USIA 30 DIHITUNG SEJAK PELANTIKAN

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan syarat usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan pasangan calon (paslon) terpilih lewat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024.

PKPU itu ditetapkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin (1/7). Dalam PKPU disebutkan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur secara serentak pada 1 Januari 2025. Kemudian, Hasyim menambahkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih bisa juga digelar setelah 1 April 2027.

Hal ini disebabkan ada Bupati dan Wakil Bupati Yalimo hasil Pilkada 2020 yang baru dilantik pada 2022. Karena itu, mereka akan menjabat sampai 2027.

"Pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027," kata Hasyim. (cnni/js)

calon kepala daerah dari yang berusia paling rendah 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun tingkat kota/kabupaten "terhitung sejak penetapan pasangan calon" menjadi "terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih".

Pada Minggu (30/6), Hasyim pun telah menyampaikan para kepala daerah terpilih harus dilantik secara serentak pada 1 Januari 2025. Kemudian, Hasyim menambahkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih bisa juga digelar setelah 1 April 2027.

Hal ini disebabkan ada Bupati dan Wakil Bupati Yalimo hasil Pilkada 2020 yang baru dilantik pada 2022. Karena itu, mereka akan menjabat sampai 2027.

"Pelantikan serentak paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027," kata Hasyim. (cnni/js)

Poldasu dan...

Dari Halaman 1

Bahkan, Pj Bupati Paluta dinilai tidak netral menjelang pilkada 2024, karena membiarkan salah satu foto bakal calon kepala daerah dipasang di depan kantor desa.

"Fakta yang kami temukan di Desa Nagasaribu, ada pembangunan pasar tradisional kerjasama Pemda dan Kementerian Perdagangan mangkrak pada tahun 2014. Kemudian pembangunan jalan tahun 2022 di Dinas PU, juga Pembangunan sarana air bersih di beberapa desa diduga fiktif. Dugaan korupsi terkait kegiatan menggunakan anggaran desa yang tidak tepat sasaran oleh dinas PMD dan kepala desa," ungkap Afrizal.

Karenanya, massa meminta dengan banyaknya temuan tersebut, Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumut segera melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai aturan yang berlaku terbuka

KPK Sita...

Dari Halaman 1

Hakim menilai Terbit telah terbukti menerima suap sebesar Rp572 juta dari Direktur CV Nizhami Muara Perangin Angin sebagai mana dalam dakwaan alternatif pertama.

Hakim juga mencabut hak politik Terbit selama lima tahun. Itu mulai terhitung sejak bersangkut-mas selesai menjalani masa pidana pokok sembilan

dan seadil-adilnya.

Usai melakukan orasi, salah seorang Jaksa fungsional Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Joice V Sinaga yang menanggapi tuntutan massa, mengucapkan terima kasih atas unjuk rasa hari ini berjalan damai.

Ia menjelaskan, laporan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan dan memastikan bahwa kejaksaan tidak pernah mengabaikan laporan dari masyarakat.

Nantinya laporan tersebut akan dipelajari, dan di proses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih terhadap kasus apapun. "Sesuai amanah dari bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, saya hari ini diminta untuk menerima unjuk rasa masyarakat dari Kabupaten Paluta. Pada prinsipnya dalam penegakan hukum, kejaksaan tidak akan pilih-pilih apalagi memberantas korupsi," sahutnya. (A-10)

tahun penjara.

Sementara itu, Iskandar Perangin Angin bersama dengan orang kepercayaan Terbit, Marcos Surya Abdi, divonis dengan pidana 7,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsidi lima bulan kurungan. Dua terdakwa lainnya yaitu Shuhanda Citra dan Isfi Syaifitri divonis dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidi tiga bulan kurungan. (cnni/js)



Hidayah

Budaya Mundur

Dari Halaman 1

Di Jepang Menteriannya mundur dari jabatan sete;ah ketahuan anak buahnya terjerat kasus korupsi.

Bedan dengan Indonesia, Menteriannya yang sudah ketahuan korupsi tidak mau menyatakan mundur. Begitulah beda budaya kita dengan negara yang sudah maju itu.

Di Jepang, ada budaya malu kala seseorang gagal menjalankan fungsinya sebagai pejabat atau atasan. Bahkan ketika kesalahan itu dilakukan anak buah, para pejabat dan petinggi Jepang menganggap hal itu sebagai tanggung jawab moral mereka.

Logika orang Jepang sangat sederhana. Jika anak buah salah, bosnya yang ikut bertanggung jawab karena bos bertugas mengawasi kerja anak buah. Bos atau pejabat tinggi tidak bisa dengan mudah cuci tangan dari kesalahan anak buah di lapangan.

Pejabat negara kita boleh

jadi urat malunya sudah putus, begitu istilahnya. Artinya sudah tidak tahu malu lagi. Lihat puluhan anggota dewan bisa-banya terlibat bermain judi online.

Di negara kita, Indonesia ini banyak pejabat publik yang dipilih rakyat juga menyatakan mundur, tetapi bukan karena merasa bersalah, tetapi pingin mendapatkan jabatan lebih tinggi lagi, misalnya setelah menjadi Walikota berniat lagi menjadi Gubernur, setelah gubernur berniat lagi menjadi Wakil Presiden atau Presiden, barulah mereka mundur dar jabatannya.

Dalam komunikasi politik pejabat, pejabat kita punya dua muka. Terutama menyangkut akuntabilitas. Jika institusi yang dipimpin sedang berprestasi, maka itu seolah prestasi dirinya seorang, terlihat dari wajah sang pejabat yang dipajang di poster dan baliho. Akan tetapi, saat institusinya blunder, mitigasinya adalah "tanggung jawab bersama". (*)

Tiga Eks...

Dari Halaman 1

diansyah Daulay kepada pihak ketiga senilai Rp3.010.459.167," tutur Desy Christiani.

Terdakwa Bambang Prabowo dan Mangapul Bakara memerintahkan serta menandatangani pembelanjaan di luar dari rencana bisnis dan anggaran (RBA) BLU RSUP H Adam Malik pada 2018 dalam persiapan akreditasi joint commission internasional (JCI) dan kelas rawat inap standar (KRIS).

"Bambang bertanggung jawab atas pengeluaran dana BLU, dan memerintahkan terdakwa Ardiansyah untuk menandatangani cek atau giro Bank Bukopin, walaupun Ardiansyah sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara Pengeluaran BLU," bebarnya.

Selain itu, Bambang Prabowo dan Mangapul Bakara juga menerima fasilitas untuk kepentingan pribadi dari terdakwa Ardiansyah Daulay berasal dari dana BLU RSUP H Adam Malik, dan pungutan pajak yang tidak disetor.

Bambang Prabowo dan Mangapul Bakara tidak melakukan pengawasan terhadap uang persediaan yang melebihi dari ketentuan yang dilakukan oleh Ardiansyah Daulay. Sedangkan terdakwa Ardiansyah Daulay melakukan

pembayaran kepada pihak ketiga secara tunai dan mencatat pengeluaran dalam BKU, tetapi tidak membayarkan kepada pihak ketiga senilai Rp 3.010.459.167.

"Terdakwa Ardiansyah telah memotong PPN (Pajak Pertambahan Nilai), tapi tidak menyetorkan ke kas negara. Ardiansyah telah memotong PPh (Pajak Penghasilan) 21 dan PPh 23 tahun 2018, tapi tidak menyetorkan ke kas negara senilai Rp5.048.996.036," katanya.

Terdakwa Ardiansyah Daulay mengusulkan pembelian barang untuk kepentingan pribadi terdakwa Bambang Prabowo dan terdakwa Mangapul Bakara atas perintah terdakwa Mangapul Bakara.

"Terdakwa Ardiansyah melakukan pembelian barang untuk kepentingan pribadi terdakwa Bambang dan terdakwa Mangapul. Atas perbuatan itu, ketiga terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp8 miliar," jelasnya.

Setelah pembacaan surat dakwaan oleh JPU Kejari Medan, Hakim Ketua Nurmiati menunda persidangan dan dilanjutkan dengan agenda nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan. (bes/js)

Kompolnas Ri...

Dari Halaman 1



dan melihat langsung proses pemeriksaan dan pengusutan yang dilakukan Polres Tanah Karo terkait kasus kebakaran rumah wartawan yang terjadi pada Kamis (26/6) lalu, yang mengakibatkan satu keluarga yang terdiri dari empat orang termasuk Rico Sempurna Pasaribu (wartawan Tribra TV) meninggal dunia. Pantauan Mimbar Umum, terlihat Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) DR Benny Jozua SH MSi beserta rombongan mengadakan pertemuan dengan Plh Kapolres Tanah Karo AKBP

Oloan Siahaan SIK MH beserta jajarannya di Aula Purpursage.

Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) DR Benny Jozua Mamoto SH MSi kepada wartawan mengatakan, kedatangannya ke Mapolres Tanah Karo untuk memberi masukan dan apa yang telah dilakukan terkait pelayanan kepada masyarakat sekaligus menerima paparan terkait kasus yang sedang ditangani seputar kebakaran rumah wartawan.

"Kedatangan kita (Kompolnas) ke Polres Tanah Karo untuk menerima masukan apa yang telah dilakukan untuk pelayanan masyarakat sembari memberi masukan untuk peningkatan pelayanan sekaligus menerima paparan tentang penanganan kasus kebakaran rumah wartawan dan langsung sekalian meninjau ke TKP," ujar Benny Mamoto. (B 019)

Wartawan Karo...

tyang segera di 'takedown'. Hanya saja, pihak perusahaan tidak mendelete berita itu. Setelahnya, ada juga diduga petugas kepolisian sempat menghubungi perusahaan online tempat korban bekerja, meminta agar pemberitaan dibuat secara halus. Berita dimaksud adalah peristiwa demo organisasi keagamaan di Kabupaten Karo, yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot lantaran maraknya judi, prostitusi dan narkoba.

Setelah pemberitaan muncul, pimpinan media Tribra TV sempat menghubungi Sempurna Pasaribu. Korban bilang, saat itu dirinya aman-aman saja. Namun, korban bercerita pada teman-temannya, bahwa dirinya merasa was-was setelah pemberitaan tersebut. Ia dan rekannya kemudian mendapatkan 'warning' dari ketua ormas di Kabupaten Karo, bahwa mereka sedang diikuti. Ketua ormas yang mengenal korban meminta agar Sempurna Pasaribu dan temannya untuk tidak pulang ke rumah. Sehingga korban memutuskan untuk tak kembali ke kediamannya selama beberapa hari. Korban juga sempat mengaku pada temannya ingin menginap di Polres Karo demi keamanan dirinya.

Karena alasan ini pula, korban tak bisa dihubungi. Korban kemudian menyampaikan pada pimpinannya, bahwa HP miliknya terjatuh. Fakta lain terungkap, bahwa sebelum rumah korban terbakar, ternyata Sempurna Pasaribu sempat bertemu dengan oknum aparat berinisial HB tersebut. Korban ditemani oleh rekannya untuk membicarakan masalah berita judi yang naik di media online Tribra TV. Dalam pertemuan itu, HB meminta agar berita yang sudah tayang segera dihapus. HB juga meminta kepada korban agar postingan yang ada di media sosial juga segera dihapus.

Namun, korban tidak menuruti permintaan HB. Karena tidak ada kesepakatan, korban pun pulang ke rumahnya pada Rabu (26/6/2024) tengah malam di Jalan Nabung Surbakti, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Korban diantarkan oleh rekannya. Setelah

korban masuk ke dalam rumah, rekan korban meninggalkan lokasi. Informasi lain menyebutkan, bahwa sekira pukul 02.30 WIB, sebelum kebakaran terjadi, ada yang melihat sekira lima orang pria berada di sekitar rumah korban. Lalu, pukul 03.00 WIB terjadilah kebakaran.

Pascakebakaran, sejumlah saksi diperiksa termasuk rekan korban yang saat itu bersama dengan korban. Saat pemeriksaan, informasi menyebutkan bahwa penyidik sempat mengambil handphone milik saksi (rekan korban). Saksi (rekan korban) sempat menolaknya. Namun penyidik pun mengambil HP saksi, dan mendelete pesan ketua ormas yang sempat memberikan 'warning' tersebut.

Fakta lain dalam kasus ini, anak korban juga mengaku merasa terancam saat dimintai keterangannya di Polres Karo. Pada awak media setelah kedatangan Kapolda Sumut, anak perempuan korban mengaku diminta mengamini keterangan yang tak pernah ia sampaikan kepada penyidik. Atas temuan-temuan ini, KJJ Sumut menyatakan sikap bahwa:

1. Meminta Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini, terutama mengungkap adanya kejangalan-kejangalan yang terjadi.
2. Meminta Panglima TNI untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI, yang disebutkan korban dalam pemberitaannya.
3. Mendorong semua jurnalis di Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, dan menaati kode etik jurnalistik.
4. KJJ Sumut tidak membenarkan tindakan penyalahgunaan profesi untuk kepentingan tertentu, selain untuk kepentingan publik.
5. Mendorong semua perusahaan media agar memperhatikan keselamatan setiap jurnalisnya yang bekerja di lapangan, dan terus mengingatkan agar bekerja sesuai kode etik.
6. Mendorong Dewan Pers untuk terus berperan aktif mengevaluasi dan menindak media yang tidak menjalankan ketentuan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. (A-10)

TNI: Silahkan...

hukum tersebut. Justru itu membantu tugas kami dalam penyelidikan masalah tersebut nantinya," katanya.

Ia menegaskan, proses hukum bakal ditegakkan jika memang anggota terlibat dalam peristiwa itu. "Jika benar terbukti, pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," ujarnya.

PEMERIKSAAN SAKSI

Sementara, hingga kini Polisi sudah memeriksa sekitar 16 saksi terkait insiden kebakaran yang menewaskan satu keluarga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut). Saksi itu terdiri dari keluarga hingga warga yang melihat kebakaran tersebut.

"Ada lebih dari 16 saksi yang sudah dimintai

keterangan. Saksi-saksi tentunya yang melihat, yang mengetahui, ada di TKP, keluarga. Kemudian proses autopsi juga sudah dilakukan, penyebab kematian karena terbakar," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin (1/7/2024) kemarin.

Hadri menyebut terkait isu yang menyatakan bahwa istri Sempurna Pasaribu, Efrida Ginting tengah hamil, tidaklah benar. Namun, dari hasil autopsi, istri Sempurna mengidap penyakit kista.

"Sebelumnya ada isu terkait dengan istrinya tengah hamil, hasil autopsi ternyata mengalami penyakit kista, itu juga sudah dilakukan hasil otopsinya sudah keluar. Kita menunggu hasil otopsi secara utuh dari labfor, RS Bhayangkara, dan proses penyelidikan dan penyidikan masih terus berjalan," tandasnya. (bes/A-10)

Utang Negara...

bentuk SBN valuta asing per akhir Mei 2024 sebesar Rp1.442,85 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara Rp1.086,55 triliun dan SBSN Rp356,30 triliun.

Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp36,42 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,10 triliun.

Pinjaman luar negeri itu terdiri dari bilateral sebesar Rp265,83 triliun, multilateral Rp584,65 triliun dan commercial banks sebesar Rp118,62 triliun.

Adapun rasio utang mencapai 38,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per akhir Mei 2024. Angka ini konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rasio utang Mei juga menurun dari angka rasio utang terhadap PDB bulan sebelumnya yang mencapai 38,64 persen.

"Pembayaan utang on track dan manageable mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal," bunyi Kemenkeu lebih lanjut. (cnni/js)